

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang sedang giat melakukan pembangunan. Untuk mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis. Roda pemerintahan dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana, terutama dari penerimaan dalam negeri. Adanya peningkatan kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan cenderung untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara dari sumber stabil, berasal dari masyarakat sendiri.

Salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan yaitu dari sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu negara dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dengan mandiri. Karena pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung dapat ditunjukkan dalam rangka pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya sangat memerlukan dana yang jumlahnya setiap tahun semakin meningkat. Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintahan dalam membenahi semua sektor terutama sektor perekonomian. Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana negara berupa pajak saat ini telah menjadi hal utama dalam penerimaan negara. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah atau departemen keuangan mengevaluasi penerimaan pajak. Evaluasi yang dilakukan seperti mengevaluasi wajib pajak yang terlambat bayar tepat waktu, lebih bayar dan kurang bayar dan lain-lain.

Ketentuan pajak yang diatur dengan undang-undang, wajib hukumnya bagi setiap wajib pajak untuk mentaati segala peraturan pajak. Setiap wajib pajak, wajib untuk membayar pajaknya ke kas negara dan melaporkan ke kantor pajak. Jika masyarakat wajib pajak tidak mentaati kewajibannya untuk membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kinerja kantor pelayanan pajak salah satunya bisa dievaluasi dari jumlah penerimaan pajak ada hubungannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak pada kantor pelayanan pajak patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak dan dengan tepat waktu, maka penerimaan pajak akan tepat waktu sesuai dengan target yang ingin dicapai. Namun jika wajib pajak tidak patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak, maka akan menyebabkan pemasukan kantor pelayanan pajak menjadi rendah.

Menciptakan masyarakat yang patuh pajak sebenarnya dilaksanakan dengan maksud untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya. Untuk dapat menjadikan wajib pajak yang patuh dan taat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak, pemerintahan dan Departemen Keuangan bekerja sama dalam mengatasi masalah tersebut. Diantaranya dengan memberikan surat pemberitahuan pajak dan surat teguran pajak kepada wajib pajak. Jika pemberitahuan tersebut tidak diindahkan oleh wajib pajak, maka wajib pajak dikenakan sanksi dan dituntut secara hukum. Untuk itu petugas pajak maupun wajib pajak haruslah memahami tentang pedoman dan pelaksanaan dalam membayar pajak. Dengan dibuat peraturan tersebut diharapkan akan terciptanya kepatuhan bagi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Penerapan kepercayaan terhadap wajib pajak menyebabkan pemerintah harus extra ketat dalam hal pengawasan perpajakan. Hal ini untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi, oleh karena itu pelaksanaan dalam penerimaan pajak haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan diharapkan partisipasi dan kepatuhan yang baik dari wajib pajak yang diwajibkan membayar pajak untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penerimaan kantor pelayanan pajak. Bila hal ini dapat dilaksanakan maka kemungkinan besar penerimaan negara dari sektor pajak dapat ditingkatkan.

Besarnya jumlah penerimaan pajak orang pribadi ada hubungannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk itu perlu diketahui apakah tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak

berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dengan mengumpulkan beberapa jenis data seperti jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor dan membayar pajak penghasilan tepat waktu dan jumlah penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dari tahun 2009 sampai 2011.

Berdasarkan latar belakang diatas dan melihat dari adanya potensi penerimaan Pajak Penghaslan Orang pribadi yang cukup besar, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan pelaporan wajib pajak pada penerimaan pajak tersebut di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana kondisi tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak PPh orang pribadi yang terjadi khususnya dalam kurun waktu tiga tahun di KPP Pratama Jakarta Pulogadung ?
2. Bagaimana kondisi kontribusi penerimaan PPh Orang Pribadi yang terjadi khususnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penerimaan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Mengetahui seberapa besar kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

Untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta pulogadung.

b. Bagi KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Untuk memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung bahwa ternyata ada kaitannya antara kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

c. Bagi Fakultas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Jakarta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan masukkan untuk memberikan gambaran dalam penelitian yang lebih mendalam mengenai kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada penerimaan pajak.